

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p>Implementation, Program, Stunting Reduction</p>	<p><i>This research is motivated by the high number of stunting in Indonesia which affects the quality of human resources (HR) in the future. This condition occurs due to chronic malnutrition during childhood growth, which results in stunted physical growth. It is hoped that the implementation of the stunting reduction policy can reduce the stunting rate in Pekanbaru City. The aim of this research is to find out how the Stunting Reduction Acceleration Program is implemented in reducing stunting rates in Pekanbaru City using Marille S. Grindle's theoretical model with indicators of policy content and implementation environment. This research uses qualitative methods and data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Acceleration of Stunting Reduction program has been implemented optimally at the district and city government levels, this is proven based on data on the prevalence of stunting according to the SSGI in 2023, Pekanbaru City reached 8.7%. Then also, the existence of a stunting program from the department and the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) makes it easier to deal with stunting cases in each sub-district..</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p>Kata Kunci:</p> <p>Implementasi, Program, Penurunan Stunting</p> <hr/> <p>Corresponding Author: irdayanti@uin-suska.ac.id</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Indonesia yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan anak-anak, yang mengakibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan penurunan stunting bisa menekan angka stunting di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Percepatan Penurunan Stunting dalam menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru menggunakan model teori Marille S. Grindle dengan indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi program Percepatan Penurunan Stunting sudah dilaksanakan secara optimal ditingkat pemerintahan Kabupaten dan Kota, hal ini dibuktikan berdasarkan data prevalensi stunting menurut SSGI pada tahun 2023 Kota Pekanbaru mencapai di angka 8,7%. Kemudian juga dengan adanya program stunting dari dinas dan Tim Pecepatan Penurunan Stunting (TPPS) mempermudah dalam penanggulangan kasus stunting di setiap kecamatan.</p>

PENDAHULUAN

Mempersiapkan negara Indonesia menuju generasi emas pada tahun 2045 tidaklah mudah. Generasi emas 2045 merupakan hal yang tidak mudah dikarenakan stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun. Kondisi ini mengganggu dinamika Indonesia Generasi Emas 2045 dan harus segera dihilangkan agar pertumbuhan tidak terhambat (Hafzana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, 2021). Kekurangan gizi kronis pada kehidupan awal akan merugikan masa depan, termasuk kurang pendidikan, keterampilan kognitif yang lebih buruk, pendapatan yang lebih rendah dan lebih tinggi kemungkinannya hidup dalam kemiskinan (Tampubolon, 2020).

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah belakangan ini adalah membahas permasalahan kesehatan yang cenderung buruk. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek (Kementerian Desa, 2017) .

Dalam Undang-undang Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting ialah dengan cara membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Nasional yaitu kementerian/lembaga, Tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan tingkat Desa (Perpres, 2021).

Gubernur Riau mengatakan target yang ingin dicapai dalam penanganan stunting adalah kurang dari 14%, yang berada di bawah target nasional. Kemudian memerlukan kerja sama antar pendamping, bidan, PKK, lurah, dan camat untuk menurunkan angka stunting di Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Pekanbaru juga telah mencanangkan program pemberian tambahan gizi kepada ibu hamil dan anak stunting, termasuk pembagian susu tambahan, telur, beras, dan makanan pokok setiap bulannya. Selain itu, baznas memberikan dukungan kepada keluarga yang menderita stunting dan kemiskinan (Kemenkopmk, 2023).

Permasalahan gizi buruk di Indonesia merupakan permasalahan kesehatan yang belum mampu diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari data survei dan penelitian seperti Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang melaporkan bahwa prevalensi stunting jangka sangat pendek di Indonesia sebesar 19,3%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia pada

tahun 2013 (19,2%). Hal ini menunjukkan masih banyak anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia yang menderita gizi buruk kronis dan program pemerintah yang dilakukan selama bertahun-tahun belum sepenuhnya berhasil (Candra, 2020).

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak tidak dapat berkembang akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, anak-anak berukuran lebih kecil dari anak-anak normal pada usia yang sama dan memiliki perkembangan berpikir yang lambat (Kemenkes, 2018).

Stunting pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya penyakit kronis dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak. Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang dimana bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan stunting dapat menjadi permanen hingga anak tumbuh sebagai remaja pendek. Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya asupan gizi pada anak dan masih rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Putri & Zulkarnaini, 2023).

Stunting merupakan perkembangan langsung dari perkembangan anak yang tidak tepat atau digambarkan dengan perkembangan mental, mental dan spiritual yang di bawah standar, sehingga menjadi bagian dari masalah. Selain itu, kesehatan buruk yang terus-menerus sepanjang pertumbuhan dan perkembangan paling dasar pada awal kehidupan, dijelaskan oleh kurangnya energi, protein dan yang menghambat perkembangan idea (Afdayati Dwi Putri & Kusuma Habibie, 2022).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru juga terus melakukan kerjasama dengan aktor-aktor seoptimal mungkin dengan instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam penanganan kasus gizi buruk ini, seperti dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Puskesmas dan Posyandu atau kader di setiap daerah, maupun dengan kecamatan. Sehingga kasus gizi buruk ini selalu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan nantinya akan dapat mengurangi kasus gizi buruk yang ada di Kota Pekanbaru.

Pemilihan Kota Pekanbaru, karena berhasil menurunkan atau memaksimalkan presentasi angka stunting hingga tahun 2022 diangka 17% dan pada tahun 2023 diangka 8,7% sehingga berada di titik normal. Kemudian Kota Pekanbaru mengalami presentasi

sangat stabil, tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ada beberapa program yang dilakukan sehingga angka stunting di Pekanbaru menjadi di atas rata-rata.

Dapat dilihat bahwa data stunting Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang angka stunting dari tahun ke tahun mengalami penurunan angka stunting. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru melakukan beberapa program yaitu Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting, Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting, Dapur Sehat Atasi Stunting, Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota, dan Audit kasus stunting (Disdaldukkb, 2022).

Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan kemudian 83 kelurahan dengan luas wilayah 632,26 Km. Melihat kejadian stunting di Kota Pekanbaru yang masih cukup tinggi. Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 233 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau, bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan, perkembangan anak, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita (Pergub, 2022).

Keputusan Wali Kota Pekanbaru No. 263 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru. Bahwa untuk efektivitas dan sinergitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, maka perlu mengubah Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru (Walikota Pekanbaru, 2022).

Dari Penelitian Ilmiah Wahana Pendidikan Tentang Strategi Dinas Dalam Kesehatan Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini pada dinas kesehatan dalam penanganan Stunting di kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Dalam penanganan stunting di kota Pekanbaru yang dikembangkan menjadi tiga indikator yaitu program, anggaran dan prosedur memberikan dampak yang baik.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk, melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus stunting yang terjadi agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang khususnya masyarakat Pekanbaru dengan tujuan berkurangnya penderita stunting di Kota Pekanbaru Oleh karena itu, penelitian ini di angkat dengan judul **“Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru”**.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Jl. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285 sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Sumber data itu ada 2 (dua), yaitu: data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini ialah kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. kemudian yang informan tambahan ditambahkan pada penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dalam pelaksanaan penurunan stunting di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
2	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1
3	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1
4	Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia	1
5	Masyarakat	2
	Jumlah	6

Sumber: Olahan Penulis

Teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

5.1.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan atau program akan mempengaruhi pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan yang kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator ini menegaskan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan banyak kepentingan dalam implementasinya, dan kita ingin mengetahui lebih jauh sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si yang mengatakan :

“berdasarkan Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting sehingga berdirinya program percepatan penurunan stunting dengan adanya upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergensi, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa”
(wawancara 13 Mei 2024)

Dari wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program merupakan upaya untuk penurunan stunting sehingga dapat mencegah stunting di kalangan masyarakat. Terlaksananya program stunting dan yang melatar belakangi program stunting melalui Peraturan Presiden No 72 tahun 20221 tentang percepatan penurunan stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: menurunkan prevalensi, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki program-program penurunan stunting yang dibentuk berdasarkan juknis. Dengan adanya program tersebut dapat mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kota Pekanbaru dan dapat membawa perubahan yang baik untuk semua masyarakat. Dengan adanya program stunting yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat menerapkan dengan rajin dapat keposyandu untuk pemeriksaan agar terhindar dari stunting.

b. Jenis manfaat

Kebijakan yang membawa manfaat bersama bagi banyak orang dan mudah dilaksanakan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran masyarakat. Kebijakan tersebut harus memberikan suatu jenis manfaat yang positif yang

dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si yang mengatakan :

“tentunya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh seperti mempersiapkan generasi yang berkualitas kedepannya, dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dilihat dari IQ, dan dari segi fisik tidak terjadi tumbuh kembang anak yang pendek dan tinggi badan yang ideal” (wawancara 13 Mei 2024)

Pencegahan stunting mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Investasi dalam penanganan stunting tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan keluarga, namun juga mempunyai dampak positif yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan ini kita mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat pada saat stunting dicegah dengan baik maka angka stunting akan menurun di Kota Pekanbaru. Dengan kata lain, pencegahan stunting adalah landasan utama pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

c. Perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena kebijakan sanksi tidak diterapkan secara konsisten. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si menyatakan:

“faktor yang mendukung perubahan stunting sumber masalahnya yang komplek. Sasarannya dari hulu yaitu:

- *remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah*
- *calon Pengantin ini harus dilihat dari berat badannya sudah ideal sama tinggi badannya, lalu bagaimana umurnya apakah terlalu muda atau terlalu tua untuk menghindari tambah darah*
- *faktor perubahan yang harus diperhatikan ibu hamil yang melahirkan anak dari baduta bagaimana pemahaman orang tua mengenai pola asuh, pola makan, dan pentingnya asi, tumbuh kembang anak dan posyandu.*
- *Baduta atau Balita dilihat dari bagaimana imunisasinya, asi yang diberikan apakah sudah cukup dan balita 0-59 bulan harus dipantau perkembangan melalui posyandu” (wawancara 13 Mei 2024)*

Kemudian berdasarkan data peneliti menganalisa bahwa adanya perubahan dalam penurunan angka stunting di Kota Pekanbaru. Penurunan prevalensi angka stunting

menjadi 8,7% adalah pencapaian yang signifikan dalam bidang kesehatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Kota Pekanbaru sudah berhasil dalam penanggulangan stunting dengan kebijakan yang sudah ditentukan. Penurunan prevalensi stunting menjadi 8,7% adalah hasil dari berbagai intervensi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di berbagai sektor. Faktor-faktor seperti peningkatan gizi, sanitasi, akses ke layanan kesehatan, kebijakan pemerintah, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan monitoring yang efektif semuanya berperan dalam mencapai hasil ini. Terus memperkuat dan memperluas intervensi yang efektif, serta memastikan keberlanjutan program-program yang ada, akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini di masa depan.

Peneliti menganalisa bahwa perkembangan kasus balita dan baduta stunting di Kota Pekanbaru dari tahun 2022 dan 2023 membawa perubahan penurunan stunting. Dapat dipastikan bahwa pemerintah juga sudah memiliki tim untuk turun kelapangan dalam penanggulangan stunting di pemerintah pusat, daerah maupun desa.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si mengatakan :

“pertama kita menganut pada Perpres No 72 Tahun 2021, jadi dari perpres tersebut ada turunan. Yang dibuat lagi oleh bkkbn yaitu Ranpasti. Peraturan percepatan penurunan stunting, kemudian dari Ranpasti ini diturunkan lagi buat kebijakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Lalu Tim percepatan penurunan stunting yang di SK kan oleh pak pj walikota untuk mengurus dan mengelola upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru. Tppts ini intruksi dari pusat untuk dibentuk ke masing-masing daerah tidak hanya Kabupaten/Kota, tetapi juga sampai Kecamatan” (wawancara 13 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa sub indikator letak pengambilan keputusan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan dalam penurunan stunting di Kota Pekanbaru dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Untuk menganalisis kebijakan penanggulangan stunting, kita perlu melihat beberapa aspek utama yaitu latar belakang kebijakan, tujuan dan sasaran, komponen kebijakan, implementasi kebijakan, dan tantangan dan hambatan. Berikut

adalah analisis mendalam mengenai kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru :

1. Latar Belakang Kebijakan

- a. Prevalensi stunting dilihat dari kegagalan pertumbuhan anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dibandingkan dengan tinggi badan atau usianya.
- b. Dampak Kesehatan dan Sosial yaitu stunting dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa dewasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

- a. Tujuan jangka panjang: Mengurangi prevalensi stunting secara signifikan dalam waktu 5-10 tahun.
- b. Tujuan jangka pendek: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan sanitasi.

3. Komponen Kebijakan

- a. Intervensi gizi spesifik: Program suplementasi mikronutrien misalnya zat besi dan vitamin, mendorong pemberian ASI eksklusif dan memberikan nutrisi tambahan kepada anak-anak dan wanita hamil.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan: Memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas dan Posyandu, melatih tenaga kesehatan dan menyediakan fasilitas kesehatan.

4. Implementasi Kebijakan

- a. Kolaborasi Antar Sektoral: kolaborasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, kementerian agama, dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa program dilaksanakan secara efektif.
- b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Keterlibatan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

5. Tantangan dan Hambatan

- a. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program secara optimal.

- b. Perubahan Perilaku: Mengubah perilaku masyarakat dalam hal pola makan dan kesehatan membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi, perumusan kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak di Kota Pekanbaru. Pencegahan stunting memerlukan komprehensif dan kolaboratif antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Upaya ini harus dimulai sejak masa kehamilan dan dilanjutkan selama periode awal kehidupan anak untuk memastikan mereka memiliki kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

e. Implementasi program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Tingkat keberhasilan juga lebih tinggi bila pelaksana program mempunyai keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan bidang ketahanan dan keluarga sejahtera Ibu Dina yang mengatakan:

“kalau dibilang sulit tidak, karna ini menyangkut dengan perubahan perilaku dan midset jadi memang butuh proses. Dari yang tidak tau menjadi tau dan harus bisa kesadaran, lalu bisa menyadarkan masyarakat agar rajin ke posyandu dan tim pendamping keluarga saat turun ke lapangan tetapi ada penolakan dari masyarakat karena Tpps ingin memberikan edukasi mengenai stunting” (wawancara 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa sub indikator implementasi program ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program stunting di Kota Pekanbaru. Dari implementasi program dalam pelaksanaannya melalui proses dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang stunting menjadi mengetahui.

f. Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi akan difasilitasi jika sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan. Sumber daya ini ada dalam bentuk manusia, keahlian, pendanaan, dan peralatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si yang mengatakan :

“sumber pendanaan penanggulangan stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda)” (wawancara 13 Mei 2024)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa sub indikator sumber daya ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan untuk memberikan sumber daya yang layak. Dengan adanya sumber daya pihak pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan, makanan dan sarana prasarana untuk penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru. Pendanaan penanggulangan stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berasal dari beberapa sumber utama:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disalurkan untuk berbagai program kesehatan dan gizi, termasuk pencegahan stunting. Dana ini biasanya dialokasikan melalui layanan kesehatan masyarakat atau instansi terkait lainnya.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK): Pemerintah pusat memberikan DAK kepada daerah-daerah untuk mendanai program-program spesifik, termasuk kesehatan dan penanggulangan stunting. DAK ini bisa berupa DAK fisik (untuk pembangunan fasilitas kesehatan) atau DAK non-fisik (untuk program-program kesehatan dan gizi).

5.1.2 Lingkungan Implementasi

a. **Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor**

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Ketika kekuatan politik tertarik pada suatu program, mereka akan Menyusun strategi untuk bersaing dalam implementasinya sehingga mereka dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si yang mengatakan :

“pertama strategi koordinasi dan penguatan TPPS Kota Pekanbaru, Kecamatan hingga Kelurahan, kedua memaksimalkan pendampingan keluarga berisiko stunting dengan tujuan agar keluarga berisiko stunting mendapatkan informasi dan edukasi terkait stunting, melakukan fasilitasi layanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial, ketiga pelaksanaan Audit Kasus Stunting 2x satu tahun untuk menemukan sasaran stunting dan berisiko stunting kemudian dilakukan analisa oleh tim pakar spesialis anak, spesialis obgyn, ahli gizi, psikolog” (wawancara 13 Mei 2024)

Strategi ini merupakan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi dalam mengatasi stunting di Kota Pekanbaru. Kolaborasi yang kuat melalui TPPS memastikan sinergi antar lembaga, dan dukungan terfokus untuk keluarga rentan memastikan intervensi yang lebih individu dan efektif. Melakukan audit penyumbatan menambahkan elemen evaluasi berkelanjutan dan memungkinkan dalam menyesuaikan strategi berdasarkan data nyata.

b. Karakteristik lembaga penguasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Implementasi program dapat menimbulkan konflik yang mempengaruhi kepentingan. Secara tidak langsung dapat menunjukkan karakteristik otoritas dan lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si mengatakan :

“pada balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badanya dan berat badan berada dibawah kisaran normal dari standar nasional. Kemudian tumbuh kembangnya jadi melambat, kemampuan dan memori belajarnya tidak baik atau kecerdasannya berkurang” (wawancara 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa mengenai sub indikator karakteristik terjadinya stunting di Kota Pekanbaru sangat banyak. Masyarakat yang kurang mampu akan sulit mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, jadi dengan adanya karakteristik ini kita dapat mengetahui bagaimana gejala stunting dengan melakukan pemeriksaan. Dari karakteristik ini secara tidak langsung dapat menunjukkan ide atau pemahaman dari stunting.

c. Tingkat kepatuhan dengan respons terhadap implementasi

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si mengatakan :

“hambatannya terkadang masyarakat engan membawa anak mereka ke posyandu untuk pemeriksaan, lalu kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya stunting, anggaran yang terbatas. Cara mengatasinya pihak pemerintah bekerja sama dengan aktor-aktor maupun kader-kader, kemudian ada juga Tim

Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mereka akan bergerak kelapangan untuk mendampingi anak yang terkenak stunting” (wawancara 13 Mei 2024)

Menurut paneliti cara mengatasi untuk dari adanya hambatan tersebut pemerintah bekerja sama dengan berbagai aktor-aktor, masyarakat, dan swasta serta kader-kader kesehatan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program, meningkatkan efektivitas penyuluhan, dan memastikan keberlanjutan program dengan dukungan berbagai pihak. Dengan adanya TPPS ini berfungsi untuk memberikan intervensi langsung, mendampingi keluarga, dan memastikan anak-anak yang stunting mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi percepatan penurunan stunting dalam menurunkan angka stunting. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru peneliti ingin melihat bagaimana mengimplementasikan program dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marileiei S. Grindle dengan 2 indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Adapun 6 program stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu bina keluarga balita kit stunting, operasional pendampingan keluarga beresiko stunting, operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga beresiko stunting koordinasi di tingkat kabupaten/kota, dan audit kasus stunting.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program oleh dinas dalam percepatan penurunan stunting untuk menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru sudah terlaksana secara optimal dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Peneliti dapat melihat dari sub indikator pelaksanaan program penurunan stunting yang dilaksanakan oleh dinas yaitu, pertama kepentingan adanya program sudah dilaksanakan ke seluruh masyarakat, kedua manfaatnya dapat dirasakan masyarakat jika stunting dapat dicegah, ketiga perubahan yang dicapai dengan angka stunting yang menurun pada tahun 2023 di angka 8,7%, keempat pengambilan keputusan merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemetintah dalam penunjukan tim percepatan penurunan stunting, kelima implementasi program ini menjalankan kebijakan dari program-program percepatan penurunan stunting, keenam sumber daya yang ada di disdaldud kb masih kurang kuantitas dan kualitas pegawai, tetapi sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). *Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan*. 7(1), 148–155.
- Afdayati Dwi Putri, S., & Kusuma Habibie, D. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Rejosari). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 457–466. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7302087>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Akbar, I., & Huriah, T. (2022). *Modul Pencegahan Stunting*. 22. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/36596/Modul Pencegahan Stunting - EBOOK.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/36596/Modul%20Pencegahan%20Stunting%20-%20EBOOK.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Anggara, S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Ardyansyah, D. (2012). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Awan Y. Abdoellan. (2016). *Buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.
- Candra. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrwxw_53QaJhPmUA3w_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bha7MtII8PgWQwYU-
- Disdaldukkb. (2022a). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. *Lembaga Administrasi Negara*, 1689–1699.
- Disdaldukkb. (2022b). *Laporan Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting*.
- Disdaldukkb. (2024). Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Disdaldukkb*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Hafzana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, P. S. (2021). *Jurnal Awam Vol 1 No 2 November 2021*. 1(2), 45–50.

- Hubaisy, Z., Suharsono, A., & Helpiastuti, S. B. (2014). Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard. *E-SOSPOL*, 1(1), 10–24.
- KBBI. (2016). *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.845.
- Kemendes. (2018). *Stunting dan Pencegahannya* 2018
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2483/stunting-dan-pencegahannya. 2483.
- Kemendes, R. (2022). *Ciri-Ciri Anak Stunting*. 2022.
- Kemenkopmk. (2023). *Penanganan Stunting Harus Berkelanjutan* 2023
<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-penanganan-stunting-harus-berkelanjutan>. 2023.
- Kementerian Desa. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*, 42.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In Cv. Aa. Rizky (Issue September).
- Pergub. (2022). *Peraturan Gubernur Riau Tentang Stunting*.
- Perpres. (2021). *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021*. 1.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pratiwi, D. J. (2023). *Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan*.
- Putri, V. Y., & Zulkarnaini, Z. (2023). Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan Stunting. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 276–287. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1329>
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Santie. (2016). MAP (Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik) Vol . 1 No . 2 ISSN 2615-2142 ABSTRACT PENDAHULUAN Halaman 183-192. *JURNal Manajemen Dan Adiministrasi Publik*, 1(2), 183–182.
- Suwitri, S. (2019). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Atmospheric Environment* (Vol. 42, Issue 13).
- Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25–32.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).
- Walikota Pekanbaru. (2022). *Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022*.

Zulfin. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *World Health Organization, World Bank Group, OECD, 1*(July), 1–100.
<http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id>